



**ANALISIS DINAMIKA FORMULASI RUU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

OLEH:

BIANCA KAZIA THESALONICA

1910413041

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar:

Nama : Bianca Kazia Thessalonica

NIM : 1910413041

Program Studi : Ilmu Politik

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka, saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 20 Maret 2025

Yang menyatakan,



(Bianca Kazia Thessalonica)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI / TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bianca Kazia Thessalonica
NIM : 1910413041
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : S1 Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS DINAMIKA FORMULASI RUU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

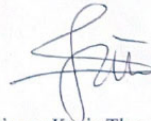
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi/Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Jakarta,

Pada tanggal : 20 Maret 2025

Yang menyatakan,



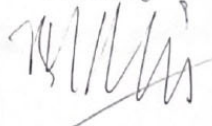
(Bianca Kazia Thessalonica)

PENGESAHAN SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR JURNAL

NAMA : Bianca Kazia Thessalonica
NIM : 1910413041
PROGRAM STUDI : Ilmu Politik
JUDUL : Analisis Dinamika Formulasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

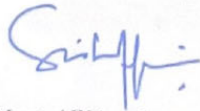
Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pembimbing



(Dr. Nurdin., M.Si)

Penguji 1



(Sri Lestari Wahyuningroem, Ph.D)

Penguji 2



(Fatkhuri, S.IP., MA., MPP)

Ketua Program Studi
Ilmu Politik



Restu Rahmawati, S.Sos., MA.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 13 Januari 2025

Abstrak

Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Indonesia menggambarkan dinamika kompleks antara aktor kritis, lembaga negara, dan proses politik. Dalam konteks ini, Feminisme Institusionalisme membantu menjelaskan bagaimana struktur formal dan informal dalam institusi legislatif mempengaruhi proses legislasi. Meskipun terdapat tantangan dari fraksi konservatif dan hambatan struktural, aktor-aktor kunci seperti Komnas Perempuan dan Kaukus Perempuan Parlemen berperan dalam mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Feminisme Institusionalisme menunjukkan bahwa meskipun norma maskulin dominan dalam institusi politik, perempuan dalam posisi strategis dapat memanfaatkan celah-celah institusional untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Proses formulasi RUU TPKS menyoroti bagaimana aktor-aktor kritis bekerja untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan adil gender.

Abstract

The ratification of the Sexual Violence Crime Bill (RUU TPKS) in Indonesia reflects the complex dynamics between key actors, state institutions, and the political process. In this context, Institutional Feminism helps explain how both formal and informal structures within the legislative institution influence the legislative process. Despite challenges from conservative factions and structural obstacles, key actors such as the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) and the Women's Parliamentary Caucus have played significant roles in pushing for policy changes that favor women. Institutional Feminism demonstrates that although masculine norms dominate political institutions, women in strategic positions can exploit institutional gaps to advocate for gender equality. The formulation process of the RUU TPKS highlights how critical actors work to drive more inclusive and gender-just policy changes.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi terkait dinamika formulasi RUU TPKS. Dalam pelaksanaan penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orangtua penulis, T. R Parulian Simatupang dan Diah Dwianawati yang mendukung dan membersamai langkah-langkah di kehidupan penulis.
2. Kakak terkasih, Anggi Tasya M. P. yang selalu menyemangati dan mendukung penulis dari kejauhan.
3. Kekasihku, Leonardo Lorencius Silalahi yang selalu ada untuk menyemangati dan mendengarkan keluh kesah penulis.
4. Sahabat dan rekan kerja terkasih yang selalu ada untuk mengasahi, memotivasi dan menghibur penulis, Cornella, Luis, Alda, Nita, Juan, Claudia dan Zania.
5. Keluarga Bapak Thomas Bangun dan Ibu Wiwin yang memberikan perhatian lebih serta dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Nurdin., M.Si selaku dosen dan pembimbing dalam penyelesaian penulisan skripsi.
7. Ibu Siti Aminah Tardi selaku Komisioner Komnas Perempuan yang menerima permohonan wawancara penulis & memberikan pandangan untuk penyelesaian skripsi.
8. Bapak Merci dari Kementerian PPPA yang juga sudah bersedia untuk penulis wawancarai dan memberikan pandangan yang sangat berguna untuk penulisan skripsi.
9. Ibu Sally selaku Peneliti Ahli Utama DPR RI yang juga sudah bersedia untuk penulis wawancarai.
10. Pekerjaan yang harus dilepas sejenak, Rumah Wijaya x Ganara Art, Algorithmics Global, dan Jayjay.

Jakarta, 26 Desember 2024

Bianca Kazia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Konsep-Konsep Penelitian	16
2.2.1 Kebijakan Kesetaraan Gender.....	16
2.2.2 Critical Actor.....	19
2.3 Teori Penelitian	21
2.3.1 Feminisme Institutionalisme.....	21
2.4 Kerangka Berpikir	23
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN	24
3.1 Objek Penelitian.....	24
3.2 Jenis Penelitian.....	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data	24
3.4 Sumber Data	25
3.5 Teknik Analisis Data	26
BAB IV PEMBAHASAN	28
4.1 Urgensi Pengesahan RUU TPKS.....	28
4.1.2 Keterbatasan hukum yang ada (Yuridis)	31
4.1.3 Melindungi hak Korban (filosofis).....	35
4.2 Analisis dinamika dan Peran Aktor yang Terlibat dalam Formulasi RUU TPKS.....	37
BAB V KESIMPULAN & SARAN.....	65

5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran	68

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2.1 Enam elemen Kunci Penghapusan Kekerasan Seksual.....	43
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2.1 Enam elemen Kunci Penghapusan Kekerasan Seksua;.....	43
Gambar 4.2.2 Peta Perjalanan UU TPKS.....	45
Gambar 4.2.3 Peta Perjalanan Waktu RDPU TPKS.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Surat Permohonan Riset.....	74
LAMPIRAN B Hasil Wawancara.....	76
LAMPIRAN C Sertifikat.....	90
LAMPIRAN D Daftar Riwayat Hidup.....	93
LAMPIRAN E Foto Penelitian.....	94